

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Semenjak diluncurkannya kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999, pendelegasian wewenang dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Tingkat I dan II mulai mendapat kepastian secara yuridis formal. Kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, yang termuat di dalam UU Nomor 22 Tahun 1999, Pasal 11 Ayat 2, di antaranya:

Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, *pendidikan* dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja. (UU Nomor 22 Tahun 1999, Pasal 11 Ayat 2)

Pengaturan lebih lanjut dari UU Nomor 22 Tahun 1999, Pasal 11 Ayat 2, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Pasal 2, Ayat 1. Ketentuan-ketentuan mengenai Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dalam bidang pendidikan yang termuat dalam PP Nomor 25/2000, Pasal 2 Ayat 1 adalah sebagai berikut:

- a. Penentuan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pelaksanaannya.
- b. Penetapan standar materi pokok.
- c. ...
- d. Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.

Memperhatikan kedua landasan yuridis formil tersebut, kewenangan penyelenggaraan pendidikan di Daerah Tingkat II, secara implisit telah mengarah kepada kebijakan pendidikan nasional dengan konsep pendidikan berbasis kompetensi. Konsep pendidikan untuk SMU, dengan pendekatan Kurikulum Berbasis Kompetensi di Indonesia, mulai mengemuka setelah sekian lama sebelumnya terjadi perhelatan mengenai konsep kurikulum apa yang cocok untuk dikembangkan di Indonesia, mulai Kurikulum 1954, 1961, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994 dengan suplemennya.

Penerapan kebijakan Kurikulum Pendidikan Berbasis Kompetensi lahir sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi pada tataran praktis, yaitu masih banyaknya siswa putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tidak dipersiapkannya siswa untuk menghadapi kondisi dunia kerja yang memerlukan kesiapan keahlian, mental, dan keterampilan hidup lainnya. Kondisi ini disadari oleh Departemen Pendidikan Nasional. Dalam poin pertimbangan mengenai pengembangan kurikulum berwawasan khusus untuk sekolah menengah umum, Depdiknas menyatakan:

Masalah besarnya proporsi lulusan yang tidak melanjutkan sekolah merupakan realitas sosial yang perlu mendapatkan respon cepat dan tepat. Sekolah perlu mengembangkan alternatif layanan program pendidikan yang mampu memberikan kecakapan hidup (*life skill*) bagi peserta didiknya. (Depdiknas, Pengembangan Kurikulum Berwawasan Khusus Untuk Sekolah Menengah Umum, 2002)

Kurikulum Berbasis Kompetensi tidak sekadar kurikulum yang mengurus aspek penataan materi pengajaran berdasarkan urutan pembelajaran tertentu. Kurikulum ini mengakomodasikan beberapa pendekatan yang relatif menyeluruh

(*holistik*) dalam penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar. Beberapa komponen yang menjadi bagian dari konsep Kurikulum Berbasis Kompetensi di antaranya, manajemen berbasis sekolah yang mengisyaratkan adanya “kemampuan kepala sekolah dalam mengelola kegiatan belajar mengajar, profesionalisme guru, keberadaan fasilitas pendidikan, *life-skill education*, hubungan sekolah dengan *stakeholder*, dan adanya jaringan yang mendukung keberhasilan terciptanya hasil akhir pendidikan (*outcome*)”. (Sosialisasi Kurikulum Berbasis Kompetensi, 2003).

Di sisi lain, Kurikulum Pendidikan Berbasis Kompetensi merupakan pendekatan dalam dunia pendidikan yang memberikan penekanan pada kemampuan siswa untuk dapat berkiprah di masyarakat setelah mereka menyelesaikan jenjang pendidikan sekolah menengah umum. Hal ini sejalan dengan pendapat Mulyasa, sebagai berikut:

Pendekatan kompetensi, merupakan model pengembangan kurikulum yang menekankan pada pemahaman, kemampuan atau kompetensi tertentu di sekolah yang berkaitan dengan pekerjaan yang ada di masyarakat. (Mulyasa, 2002: 68)

Depdiknas, untuk tahun pelajaran 2002/2003 tengah melakukan uji coba penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Pendidikan Berwawasan Khusus (PBK) di 40 sekolah menengah umum di seluruh Indonesia, dan untuk Provinsi Jawa Barat dipilih tiga sekolah menengah umum yang dinilai telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan program uji coba ini. Ketiga sekolah menengah umum pelaksana uji coba penerapan KBK dan PBK untuk Provinsi Jawa Barat adalah, SMUN 1 Cileunyi, SMUN 3 Subang untuk KBK, dan SMU Muthahari Bandung untuk PBK.

SMUN 1 Cileunyi merupakan salah satu dari tiga sekolah lanjutan tingkat atas di Jawa Barat yang mendapat kesempatan sebagai tempat dilaksanakannya proyek percontohan (*pilot project*) Kurikulum Berbasis Kompetensi. Sejak dilaksanakannya proyek percontohan penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi pada awal 2002 di SMUN 1 Cileunyi, masih ditemukan beberapa masalah dalam mengimplementasikan Kurikulum Berbasis Kompetensi.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi permasalahan dalam penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi, di antaranya adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi mensyaratkan kemampuan yang tinggi dari para guru dalam mengidentifikasi potensi para siswa yang berbeda satu sama lain. (Mulyasa, 2002) Hal ini tidak lain untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan pengembangan silabus dan bahan ajar. Kondisi ini tidak mudah diimplementasikan di lapangan, mengingat beragamnya potensi kemampuan yang dimiliki oleh satu siswa dengan siswa lainnya yang tidak sama, sehingga pendekatan untuk setiap siswa akan sangat khas dalam penerapannya.

Sejauh ini, penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi masih dipahami dan difokuskan sebagai kurikulum yang menerapkan kemampuan guru dalam mengembangkan dan menyusun silabus pengajaran, padahal penerapan konsep Kurikulum Berbasis Kompetensi memiliki perpektif yang lebih luas. Komponen lain yang seringkali terlewatkan adalah *school based management*. Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi mensyaratkan kemampuan manajerial dari

pengelola pendidikan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang terfokus pada siswa sebagai subjek pengajaran.

Keberhasilan proses pendidikan ditentukan oleh indikator-indikator pencapaian standar prestasi siswa dalam menguasai kemampuan dasar dan kemampuan kompetensi tertentu. Jenis penilaian yang dilaksanakan dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi terdiri dari dua komponen, yaitu (1) penilaian di kelas (*classroom-based assessment*), dan (2) penilaian ujian akhir. Sistem penilaian Kurikulum Berbasis Kompetensi akan berbeda dengan sistem penilaian kurikulum sebelumnya (1994) dalam menentukan kelulusan seorang siswa. Kategori kelulusan siswa dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi di dasarkan pada tingkat penguasaan materi pelajaran minimal mencapai 75% materi pelajaran, dimana indikator penilaiannya tidak lagi didasarkan pada kriteria skor (1, 2, ... 10). Oleh karenanya, kategori kelulusan siswa agar sesuai dengan tujuan Kurikulum Berbasis Kompetensi, perlu ditetapkan model penilaian praktis yang merepresentasikan kemampuan siswa yang turunkan dari indikator-indikator yang jelas berdasarkan kompetensi siswa.

Kurikulum Berbasis Kompetensi mengisyaratkan para guru untuk mampu menterjemahkan visi, misi, dan tujuan KBK ke dalam silabus dan bahan ajar. Visi dari pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah menyiapkan peserta didik (siswa) dalam memiliki kemampuan berkiprah lingkungan masyarakat, khususnya lingkungan dunia kerja (Mulyasa, 2002). Pada prakteknya, kondisi pembelajaran yang terjadi tidak jauh berbeda dengan penerapan kurikulum sebelumnya.

Observasi awal terhadap pencapaian standar kompetensi siswa, ditemukan bahwa tidak semua mata pelajaran memenuhi standar nilai yang ditetapkan depdiknas. Dalam hal ini, terdapat materi-materi pelajaran tertentu yang menunjukkan nilai rata-rata di bawah ketentuan standar kompetensi, khususnya mata pelajaran matematika, dan ilmu eksakta lainnya.

Melihat kondisi ini, diperkirakan tujuan yang ingin dicapai dalam KBK akan menghadapi kendala manakala kurikulum ini diberlakukan secara nasional. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penelitian diarahkan pada aspek-aspek permasalahan implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi, yang menganalisis permasalahan kesiapan sekolah dari sisi manajemen, kesiapan guru dalam proses penyusunan silabus berikut sistem penilaian hasil pengajaran, dan aspek output hasil pendidikan dari sisi penguasaan kompetensi yang dipersyaratkan oleh Depdiknas.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Dari uraian di atas dapat dirumuskan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi penyusunan silabus bahan pengajaran yang dilaksanakan di bawah Kurikulum Berbasis Kompetensi terhadap pencapaian standar kompetensi siswa SMUN-1 Cileunyi.
2. Bagaimana kontribusi proses belajar mengajar yang dilaksanakan di bawah Kurikulum Berbasis Kompetensi terhadap pencapaian standar kompetensi siswa SMUN-1 Cileunyi.

3. Bagaimana kontribusi manajemen SMUN-1 Cileunyi yang dilaksanakan di bawah Kurikulum Berbasis Kompetensi terhadap pencapaian standar kompetensi siswa SMUN-1 Cileunyi.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kontribusi penyusunan silabus bahan pengajaran yang dilaksanakan di bawah Kurikulum Berbasis Kompetensi terhadap pencapaian standar kompetensi siswa SMUN-1 Cileunyi.
2. Untuk menganalisis kontribusi proses belajar mengajar yang dilaksanakan di bawah Kurikulum Berbasis Kompetensi terhadap pencapaian standar kompetensi siswa SMUN-1 Cileunyi.
3. Untuk menganalisis kontribusi manajemen SMUN-1 Cileunyi yang dilaksanakan di bawah Kurikulum Berbasis Kompetensi terhadap pencapaian standar kompetensi siswa SMUN-1 Cileunyi.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat bermanfaat semua pihak, khususnya:

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan teori-teori disiplin Ilmu pendidikan, khususnya dalam pengembangan dan pengimplementasian kurikulum.



segi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan bagi SMUN-1 Cileunyi dalam upaya peningkatan prestasi sekolah.

### **1.6 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis penelitian ini adalah : Ada kontribusi penerapan program KBK kepada pencapaian standar kompetensi siswa,

Secara aspektif hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Ada kontribusi penerapan program KBK dalam aspek penyusunan silabus bahan pengajaran yang dilaksanakan di bawah Kurikulum Berbasis Kompetensi terhadap pencapaian standar kompetensi siswa SMUN-1 Cileunyi.
2. Ada kontribusi penerapan program KBK dalam aspek proses belajar mengajar yang dilaksanakan di bawah Kurikulum Berbasis Kompetensi terhadap pencapaian standar kompetensi siswa SMUN-1 Cileunyi.
3. Ada kontribusi penerapan program KBK dalam aspek manajemen SMUN-1 Cileunyi yang dilaksanakan di bawah Kurikulum Berbasis Kompetensi terhadap pencapaian standar kompetensi siswa SMUN-1 Cileunyi.
4. Ada kontribusi penyusunan silabus bahan pengajaran, proses belajar mengajar, dan manajemen SMUN-1 Cileunyi yang dilaksanakan di bawah Kurikulum Berbasis Kompetensi terhadap pencapaian standar kompetensi siswa SMUN-1 Cileunyi.



### 1.7 Asumsi Penelitian

Asumsi – asumsi penelitian ini adalah :

1. Guru SMUN 1 Cileunyi telah dibekali dengan kemampuan – kemampuan profesional, baik bersifat pengetahuan maupun metodologis yang berkenaan pembelajaran KBK yang diperoleh ketika menjalani pelatihan;
2. Kepala sekolah telah dibekali dengan kemampuan – kemampuan profesional diantaranya mengenai : mengkomunikasikan visi dan misi sekolah kepada *stakeholder* , memotivasi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, memberdayakan guru dan siswa dalam meningkatkan kualitas & hasil pembelajaran, melakukan administrasi sekolah, membaca hasil analisis data hasil belajar siswa, membuat profil potensi sekolah, meyakinkan orang tua, Dinas Kab/Kota dan Legislatif akan pentingnya pelaksanaan KBK dan konsekuensinya, melaksanakan evaluasi diri dan analisis SWOT yang diperoleh ketika menjalani pelatihan
3. Tersedianya Sarana pendukung Pembelajaran yang memadai untuk melaksanakan program KBK yaitu diantaranya : perpustakaan yang mendukung siswa, buku ajar untuk guru dan siswa, tenaga untuk melayani siswa dalam melaksanakan praktikum, alat peraga untuk membantu guru dalam mengajar, ruang teori, ruang praktikum, dan ruang pendukung lainnya, peralatan praktek, media pembelajaran, termasuk buku dan bahan ajar
5. Manajemen sekolah yang dilaksanakan sudah cukup diantaranya : waktu untuk melaksanakan program studi, ketentuan tentang tugas guru dalam



kesadaran proses pembelajaran, ketentuan sistem penghargaan terhadap guru yang berprestasi dan sanksi terhadap guru yang rendah kinerjanya, ketentuan penggunaan laboratorium, Kesadaran melakukan evaluasi diri oleh guru dan kepala sekolah.

6. Dukungan Potensi Siswa diantaranya Memiliki kemampuan awal yang memadai dan minat untuk belajar, menyadari akan batas kemampuannya, dan memahami visi dan misi sekolah.



